DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERBARU(LIST OF NEW LAWS AND REGULATIONS) April 2025

Jenis Peraturan / Types of Regulation	Nomor / Number	Judul	Title
PERIODE II BULAN APRIL 2025 *(SECOND PERIOD OF APRIL 2025)*			
	2 Tahun 2025	PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	*Fourth Amendment to Law Number 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining*
RUU		KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK	*Public Information Disclosure*
		PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA	*Third Amendment to Law Number 18 of 2017 on the Protection of Indonesian Migrant Workers*
PP	19/2025	JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	*Types and Tariffs of Non-Tax State Revenues Applicable at the Ministry of Energy and Mineral Resources*
	18/2025	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN/ATAU PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI BIDANG USAHA PERTAMBANGAN BATUBARA	*Amendment to Regulation of the Government Number 15 of 2022 on Treatment of Tax and/or Non-Tax State Revenue in the Coal Mining Business Sector*
	17/2025	TATA KELOLA PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM PELINDUNGAN ANAK	*Governance of the Organization of Electronic Systems in Child Protection*
	16/2025	PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA BADAN PENGELOLA INVESTASI DAYA ANAGATA NUSANTARA	*State Capital Contribution of the Republic of Indonesia to the Daya Anagata Nusantara Investment Management Agency*
	15/2025	PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BIRO KLARIFIKASI INDONESIA UNTUK PENDIRIAN HOLDING OPERASIONAL	*Increase in the State Capital Contribution of the Republic of Indonesia to the Share Capital of the State Share Company (Persero) PT Biro Klarifikasi Indonesia for the Establishment of an Operational Holding Company*
	12 Tahun 2025	KAWASAN EKONOMI KHUSUS INDUSTROPOLIS BATANG	*Special Economic Zone for Industrial Development in Batang*
PERPRES	21/2025	PENATAAN PENYEDIAAN LAHAN DI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	*Arrangement of Land Provision in the Batam Free Trade Zone and Free Port*
	20/2025	TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEBUDAYAAN	*Performance Allowances for Employees within the Ministry of Cultural Affairs*
	19/2025	TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI	*Performance Allowances for Employees within the Ministry of Higher Education, Science, and Technology*
	18/2025	TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	*Performance Allowances for Employees within the Ministry of Primary and Secondary Education*
	17/2025	PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERGARAMAN NASIONAL	*Acceleration of National Salt Production*
	16/2025	SISTEM SERTIFIKASI KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA	*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System*
	15/2025	PENGESAHAN INDO-PACIFIC ECONOMY FRAMEWORK FOR PROSPERITY AGREEMENT RELATING TO A CLEAN ECONOMY (PERSETUJUAN KERANGKA EKONOMI INDO-PASIFIK UNTUK KEMAKMURAN TERKAIT EKONOMI BERSIH)	*Ratification of the Indo-Pacific Economy Framework for Prosperity Agreement Relating to a Clean Economy*
INPRES	9 Tahun 2025	PERCEPATAN PEMBENTUKAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH	*Acceleration of the Establishment of Red and White Village/Sub-District Cooperatives*
	8 Tahun 2025	OPTIMALISASI PELAKSANAAN PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM	*Optimization of Poverty Alleviation and Eradication of Extreme Poverty*
	7 Tahun 2025	PERCEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN REVITALISASI SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH, PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS UNGGUL GARUDA, DAN DIGITALISASI PEMBELAJARAN	*Acceleration of the Implementation of Development and Revitalization Programs for Early Childhood Education, Primary and Secondary Education, Development and Management of Garuda Excellent Senior High School, and the Digitization of Learning*
	6 Tahun 2025	PENGADAAN DAN PENGELOLAAN GABAH, BERAS DALAM NEGERI SERTA PENYALURAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH	*Procurement and Management of Paddy, Domestic Rice, and Distribution of Government Rice Reserves*
	5 Tahun 2025	PERCEPATAN PENINGKATAN AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN PELAYANAN KESEHATAN LANJUTAN UNTUK MENDUKUNG IMPLEMENTASI TRANSFORMASI KESEHATAN	*Accelerating the Improvement of Access and Quality of Primary Health Services and Secondary Health Services to Support the Implementation of Health Transformation*
PERMEN PANRB	4 Tahun 2025	PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA SECARA FLEKSIBEL PADA INSTANSI PEMERINTAH	*Flexible Implementation of Official Duties of the Civil Servants in Government Agencies*
PERMEN KEUANGAN	27/2025	MEKANISME PENGGANTIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN BIAYA LAIN-LAIN PADA HIBAH RUMAH SAKIT KARDIOLOGI EMIRAT-INDONESIA	*Mechanism for Replacing Value-Added Tax and Other Costs on Grants for the Emirates-Indonesia Cardiology Hospital*
	26/2025	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 148/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, PENGGUNAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA AWAL DAN AKUMULASI IURAN PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN	*Amandement to Regulation of Minster of Finance Number 148/PMK.02/2021 of 2021 on Procedures for the Provision, Disbursement, Use, and Accountability of Initial Funds and Accumulated Contributions for the Job Loss Security Program*

PERMEN ESDM	11 Tahun 2025	TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN MINERAL DI KAWASAN DASAR LAUT INTERNASIONAL	*Procedures for Implementing Mineral Management and Utilization Activities in the International Seabed Area*
	10 Tahun 2025	PETA JALAN (ROAD MAP) TRANSISI ENERGI SEKTOR KETENAGALISTRIKAN	*Roadmap for the Energy Transition in the Electricity Sector*
	9 Tahun 2025	TATA CARA PENGENAAN, PENGHITUNGAN, SERTA PEMBAYARAN DAN/ATAU PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA	*Procedures for the Imposition, Calculation, and Payment, and/or Deposit of Non-Tax State Revenues at the Directorate-General of Minerals and Coal*
PERMEN KOMDIGI	7 Tahun 2025	PEMANFAATAN TEKNOLOGI MODUL IDENTITAS PELANGGAN MELEKAT (EMBEDDED SUBSCRIBER IDENTITY MODULE) DALAM PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI	*Utilization of Embedded Subscriber Identity Module (eSIM) Technology in Telecommunications Services*
PERMEN PERINDUSTRIAN	12 Tahun 2025	TATA CARA PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS IMPOR SEMEN CLINKER DAN SEMEN	*Procedures for the Issuance of Technical Considerations for the Import of Cement Clinker and Cement*
PERMEN PEKERJAAN UMUM	1 Tahun 2025	ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	*Organization and Work Procedures of Technical Implementation Units within the Ministry of Public Works*
PERMEN PERTANIAN	13/2025	PENETAPAN DAN PELEPASAN RUMPUN ATAU GALUR DARI SUMBER DAYA GENETIK HEWAN	*Determination and Release of Strains or Varieties from Animal Genetic Resources*
	11 Tahun 2025	ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN	*Organization and Work Procedures of Technical Implementation Units within the Agricultural Extension and Development Agency for Human Resources*
	10 Tahun 2025	ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN	*Organization and Work Procedures of Technical Implementation Units within the Agricultural Assembly and Modernization Agency*
	9 Tahun 2025	ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	*Organization and Work Procedures of Technical Implementation Units within the Directorate-General of Livestock and Animal Health*
	8 Tahun 2025	ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN	*Organization and Work Procedures of Technical Implementation Units within the Directorate-General of Plantations*
	7 Tahun 2025	ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN	*Organization and Work Procedures of Technical Implementation Units within the Directorate-General of Food Crops*
PERMEN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI	23/2025	PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI	*Performance Allowances for Employees within the Ministry of Higher Education, Science, and Technology*
PERMEN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	3 Tahun 2025	PEDOMAN UMUM PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA	*General Guidelines for Community Assistance in Villages*
PERMEN DALAM NEGERI	7 Tahun 2025	DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, DAN PAJAK ALAT BERAT TAHUN 2025	*Basis for the Imposition of Motor Vehicle Tax, Motor Vehicle Transfer Tax, and Heavy Equipment Tax in 2025*
PEDOMAN JAKSA AGUNG	3 Tahun 2025	PENGAWALAN DAN PENGAMANAN TAHANAN DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	*Escort and Security of Detainees within the Attorney General's Office*
KEPMEN ESDM	143.K/MG.01/MEM.M/2025	HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA BULAN MARET 2025	*Indonesian Crude Oil Price for March 2025*
	133.K/MB.01/MEM.B/2025	HARGA MINERAL LOGAM ACUAN DAN HARGA BATUBARA ACUAN UNTUK PERIODE KEDUA BULAN APRIL TAHUN 2025	*Reference Price of Metallic Minerals and Reference Price of Coal for the Second Period of April 2025*
	121.K/MB.01/MEM.B/2025	PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 1823.K/30/MEM/2025 TENTANG PEDOMAN PENGENAAN, PEMUNGUTAN, DAN PEMBAYARAN/PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK MINERAL DAN BATUBARA DAN KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 18.K/HK.02/MEM.B/2025 TENTANG PEDOMAN PEMBAYARAN/PENYETORAN IURAN TETAP, IURAN PRODUKSI/ROYALTI, DAN DANA HASIL PRODUKSI BATUBARA SERTA BEARAN/FORMULA BIAYA PENYESUAIAN DALAM KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	*Revocation of the Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 1823.K/30/MEM/2025 on Guidelines for the Imposition, Collection, and Payment/Deposit of Non-Tax State Revenues from Minerals and Coal, and the Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 18.K/HK.02/MEM.B/2025 on Guidelines for the Payment/Deposit of Fixed Contributions, Production Contributions/Royalties, and Production Revenue Funds for Coal, as well as Adjustment Costs/Formulas in Mineral and Coal Mining Activities*
KEPMEN PERDAGANGAN	469/2025	HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR	*Reference Export Prices for Mining Products Subject to Export Duties*
KEPMEN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI	63/M/KEP/2025	PETUNJUK TEKNIS LAYANAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN KARIER DOSEN	*Technical Guidelines for the Development and Improvement of the Profession and Career of Lecturers*
KEPMEN PERHUBUNGAN	KM 24/2025	PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN PUSAT INFORMASI TRANSPORTASI	*Formation of Management Team for Transportation Information Center Services*
	KM 23/2025	PUSAT INFORMASI TRANSPORTASI	*Transportation Information Center*
KEPMEN KEUANGAN	16/KM.4/2025	PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR	*Determination of Export Prices for Calculating Export Duties*
	10/KM.4/2025	PENETAPAN JENIS SATUAN BARANG BERUPA KOMODITAS EXPANSIBLE POLYSTYRENE (EPS) DAN NYLON FILM YANG DIGUNAKAN DALAM PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR	*Determination of Commodity Units for Expandable Polystyrene (EPS) and Nylon Film Used in Import Customs Notifications*
	4/KM.4/2025	PENETAPAN JENIS SATUAN BARANG YANG DIGUNAKAN DALAM PEMBERITAHUAN PABEAN EKSPOR	*Determination of Types of Commodity Units Used in Export Customs Notifications*
KEPMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN	12 Tahun 2025	PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR KEP.14/MEN/2012 TENTANG PEDOMAN UMUM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PELAKU UTAMA PERIKANAN	*Revocation of the Decree of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Number 14/MEN/2012 on General Guidelines for the Development and Strengthening of the Institutional Framework of Key Actors in the Fisheries Sector*
KEPMEN PEKERJAAN UMUM	446/KPTS/M/2025	SATUAN TUGAS PEMBANGUNAN SEKOLAH RAKYAT	*Task Force for the Development of Public Schools*
	443/KPTS/M/2025	DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI PERIODE 2025-2029	*Supervisory Board of the Construction Services Development Agency for the Period of 2025-2029*
	442/KPTS/M/2025	PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PEMILIHAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI PERIODE 2025-2029	*Formation of the Selection Committee for the Election of the Board of the Construction Services Development Agency for the Period of 2025-2029*
	441/KPTS/M/2025	PENETAPAN UNIT ORGANISASI PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	*Establishment of the Organizational Unit for Functional Positions in the Ministry of Public Works*

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI	2 Tahun 2025	PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH DAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029	*Guidelines for the Preparation of the Medium-Term Regional Development Plan and the Strategic Plan for Regional Apparatus for the Period of 2025-2029*
	1 Tahun 2025	PENGANEKARAGAMAN PANGAN BERBASIS POTENSI SUMBER DAYA LOKAL	*Diversification of Potential Local Resource-Based Food*
SE MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	6 Tahun 2025	PETUNJUK TEKNIS PERCEPATAN PELAKSANAAN PEMBENTUKAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH	*Technical Guidelines for the Acceleration of the Implementation of the Establishment of Village Cooperatives*
PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI	PER-6/BC/2025	PEDOMAN PENATAUSAHAAN PIUTANG PERPAJAKAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI	*Guidelines for the Administration of Tax Receivables in the Customs and Excise Sector*
SE DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI	30/SE/Dk/2025	TATA CARA PENYUSUNAN PERKIRAAN BIAYA PEKERJAAN KONSTRUKSI BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	*Procedures for the Preparation of Cost Estimates for Construction Work in the Public Works and Public Housing Sector*
PERATURAN BANK INDONESIA	6 Tahun 2025	PENGELOLAAN LIKUIDITAS UNTUK MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN	*Liquidity Management to Support Sustainable Economic Growth*
	5 Tahun 2025	KEBIJAKAN MONETER	*Monetary Policy*
	4 Tahun 2025	KEBIJAKAN SISTEM PEMBAYARAN	*Payment System Policy*
PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	2 Tahun 2025	PELATIHAN PENANGGULANGAN BENCANA	*Disaster Management Training*
PERATURAN KEPOLISIAN	4 Tahun 2025	PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN ORGANISASI PADA TINGKAT MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	*Sixth Amendment to the Regulation of the Chief of the Indonesian National Police Number 6 of 2017 on the Organizational Structure and Work Procedures of Organizational Units at the Headquarters Level of the Indonesian National Police*
PERATURAN OJK	7 Tahun 2025	LAPORAN BANK UMUM SEBAGAI KUSTODIAN	*Reports of Commercial Banks as Custodians*
	6 Tahun 2025	LAPORAN AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA	*Reports of Mutual Fund Sales Agents*
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BI	8 Tahun 2025	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 24/8/PADG/2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PEMENUHAN GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH	*Third Amendment to Regulation of the Board of Governors Number 24/8/PADG/2022 on the Implementing Regulation of Minimum Reserve Requirements in Rupiah and Foreign Currency for Conventional Commercial Banks, Sharia-Based Commercial Banks, and Islamic Banking Units*
PERATURAN OMBUDSMAN	61/2025	PENILAIAN MALADMINISTRASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK	*Assessment of Administrative Misconduct in the Organization of Public Services*
PERATURAN DIREKSI BEI	II-A	PERDAGANGAN EFEK BERSIFAT EKUITAS	*Equity Securities Trading*
KEPUTUSAN DIREKSI BEI	Kep-00002/BEI/04-2025	PERUBAHAN PANDUAN PENANGANAN KELANGSUNGAN PERDAGANGAN DI BURSA EFEK INDONESIA DALAM KONDISI DARURAT	*Amendment to the Guidelines for Handling the Continuity of Trading in the Indonesia Stock Exchange in Emergency Situations*
KEPUTUSAN DIREKSI KPEI	Kep-027/DIR/KPEI/0325	KEBIJAKAN KERINGANAN BIAYA PENGGUNAAN FASILITAS TRIPARTY REPO	*Policy on Fee Waivers for the Use of Triparty Repo Facility*
RANCANGAN KEPUTUSAN KEPALA BPOM		PEDOMAN REKOGNISI LABORATORIUM EKSTERNAL PENGUJIAN OBAT DAN BAHAN OBAT	*Guidelines for the Recognition of External Laboratories for Testing Drugs and Drug Ingredients*
RANCANGAN SURAT EDARAN OJK		BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN BERKALA PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI, PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI, DAN PERUSAHAAN PENILAI KERUGIAN ASURANSI	*Form and Structure of Periodic Reports for Insurance Broker Companies, Reinsurance Broker Companies, and Insurance Loss Assessment Companies*
SE GUBERNUR JAWA BARAT	37/HUB.02/KESRA	PENERTIBAN JALAN UMUM DARI PUNGUTAN/SUMBANGAN MASYARAKAT DI WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT	*Control of Public Roads from Community Levies/Contributions in the Province of West Java*
PERIODE I BULAN APRIL 2025 *(FIRST PERIOD OF APRIL 2025)*			
RUU		PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN	Fourth Amendment to Law Number 25 of 1992 on Cooperatives
RPP		TATA KELOLA PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM PELINDUNGAN ANAK	Governance of Electronic System Implementation in Child Protection
PERMEN PERINDUSTRIAN	13/2025	TATA CARA PENYAMPAIAN DATA INDUSTRI, DATA KAWASAN INDUSTRI, DATA LAIN, INFORMASI INDUSTRI, DAN INFORMASI LAIN MELALUI SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Procedures for the Submission of Industrial Data, Industrial Zone Data, Other Data, Industrial Information, and Other Information through the National Industrial Information System
PERMEN KETENAGAKERJAAN	3 Tahun 2025	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN PESERTA DAN PELAKSANAAN REKOMPOSISI IURAN DALAM PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN	Amendment to Regulation of the Minister of Manpower Number 7 of 2021 on Procedures for the Registration of Participants and Implementation of Contribution Recomposition in the Job Loss Guarantee Program
	2 Tahun 2025	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN MANFAAT JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN	Amendment to Regulation of the Minister of Manpower Number 15 of 2021 on Procedures for the Provisions of Job Loss Guarantee Benefits
PERMEN TRANSMIGRASI	2 Tahun 2025	PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN BIDANG TRANSMIGRASI TAHUN ANGGARAN 2025	Implementation of Co-Administration Task in Transmigration Sector for the 2025 Fiscal Year
PERMEN SOSIAL	2 Tahun 2025	ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN SOSIAL	Organization and Work Procedures of the Ministry of Social Affairs
PERMEN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1 Tahun 2025	ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Organization and Work Procedures of Technical Implementation Units at the Ministry of Housing and Residential Area
PERMEN PPN/KEPALA BAPPENAS	2 Tahun 2025	ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	Organization and Work Procedures of the Ministry of National Development Planning/National Development Planning Agency
PERMEN HUKUM	8 Tahun 2025	LAYANAN LEGALISASI DOKUMEN PUBLIK PADA KEMENTERIAN HUKUM	Public Document Legalization Service at the Ministry of Law
PERMEN KOMUNIKASI DAN DIGITAL	6 Tahun 2025	STANDAR TEKNIS DAN PROSEDUR PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK	Technical Standards and Procedures for the Construction and Development of Electronic-Based Governance System App
	5 Tahun 2025	PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK LINGKUP PUBLIK	Public Scope Electronic System Operator

PERMEN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	2 Tahun 2025	STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	Public Information Service Standards at the Coordinating Ministry for Infrastructure and Regional Development
	1 Tahun 2025	SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	Electronic-Based Government System at the Coordinating Ministry for Infrastructure and Regional Development
PERMEN KEHUTANAN	9 Tahun 2025	ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Organization and Work Procedures of the Technical Implementation Unit of Counselling and Human Resources Development Agency
	8 Tahun 2025	ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM KEHUTANAN	Organization and Work Procedures of the Technical Implementation Unit of the Directorate General of Forestry Law Enforcement
	7 Tahun 2025	ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PERHUTANAN SOSIAL	Organization and Work Procedures of the Social Forestry Center
	6 Tahun 2025	ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI	Organization and Work Procedures of the Sustainable Forest Management Center
	5 Tahun 2025	ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN	Organization and Work Procedures of the Technical Implementation Unit of the Directorate General of Watershed Management and Forest Rehabilitation
	4 Tahun 2025	ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM	Organization and Work Procedures of the Technical Implementation Unit of the Directorate General of Natural Resources and Ecosystem Conservation
	3 Tahun 2025	ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN	Organization and Work Procedures of the Forest Area Strengthening Center
PERMEN DALAM NEGERI	3 Tahun 2025	PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI	Establishment of Legal Products at the Ministry of Home Affairs
PERMEN PERDAGANGAN	11 Tahun 2025	PENGELOLAAN PIUTANG NEGARA PADA KEMENTERIAN PERDAGANGAN	Management of State Receivables at the Ministry of Trade
PERMEN ATR/KEPALA BPN	4 Tahun 2025	PEMBENTUKAN KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Establishment of the Regional Office of the National Land Agency of North Kalimantan Province
	3 Tahun 2025	STANDAR PELAYANAN PENATAAN RUANG PADA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	Spatial Planning Service Standards at the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency
KEPMEN PERDAGANGAN	451/2025	HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR	Export Benchmark Price for Mining Products Subject to Export Duty
	448/2025	DAFTAR MEREK REFINED, BLEACHED, AND DEODORIZED PALM OLEIN DALAM KEMASAN BERMEREK DAN DIKEMAS DENGAN BERAT NETTO KURANG ATAU SAMA DENGAN 25 KG	List of Refined, Bleached, and Deodorized Palm Olein Brands In Branded Packaging and Packaged With a Net Weight of Less or Equal to 25 Kg
	447/2025	HARGA REFERENSI CRUDE PALM OIL YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT	Reference Price of Crude Palm Oil Subject to Export Duty and Service Tariffs at the Public Service Agency for Palm Oil Plantation Fund Management Agency
	446/2025	HARGA PATOKAN EKSPOR DAN HARGA REFERENSI ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR	Export Benchmark Prices and Reference Prices for Agricultural and Forestry Products Subject to Export Duty
KEPMEN ESDM	101.K/MB.01/MEM.B/2025	HARGA MINERAL LOGAM ACUAN DAN HARGA BATUBARA ACUAN UNTUK PERIODE PERTAMA BULAN APRIL 2025	Metal Mineral Reference Prices and Coal Reference Prices for the First Period of April 2025
KEPMEN KESEHATAN	HK.01.07/MENKES/141/2025	PENETAPAN INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PENYELENGGARA PROGRAM TERAPI RUMATAN METADONA	Establishment of Mandatory Reporting Recipient Institutions and Health Service Facilities for Methadone Rumination Therapy Program Providers
KEPMEN KEUANGAN	6/KM.4/2025	DAFTAR BARANG YANG DIBATASI UNTUK DIEKSPOR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN EKSPOR SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN EKSPOR	List of Goods Prohibited Subject to Export Restriction Based on Regulation of the Minister of Trade Number 23 of 2023 on Export Policies and Arrangements as Amended Several Times, Most Recently by Regulation of the Minister of Trade Number 9 of 2025 on Third Amendment to Regulation of the Minister of Trade Number 23 of 2023 on Export Policies and Arrangements
	5/KM.4/2025	DAFTAR BARANG YANG DILARANG UNTUK DIEKSPOR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG BARANG YANG DILARANG UNTUK DI EKSPOR SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 8 TAHUN 202 5 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG BARANG YANG DILARANG UNTUK DIEKSPOR	List of Goods Prohibited from Being Exported Based on Regulation of the Minister of Trade Number 22 of 2023 on Goods Prohibited from Being Exported as Amended Several Times, Most Recently by Regulation of the Minister of Trade Number 8 of 2025 on Third Amendment to Regulation of the Minister of Trade Number 22 of 2023 on Goods Prohibited from Being Exported
KEPMEN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	141/2025	SATUAN TUGAS TRANSISI ENERGI DAN EKONOMI HIJAU	Energy Transition and Green Economy Task Force
SE MENTERI PEKERJAAN UMUM	6/SE/M/2025	TINDAK LANJUT PENGADAAN BARANG/JASA YANG TERDAMPAK EFISIENSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2025 DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	Follow-up on Procurement of Goods/Services Affected by the Efficiency of the State Revenue and Expenditure Budget for 2025 Fiscal Year at the Ministry of Public Works
SE MENTERI PANRB	3 Tahun 2025	PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PENYESUAIAN PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA INSTANSI PEMERINTAH DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PADA MASA LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA HARI SUCI NYEPI TAHON BARU SAKA 1947 DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1446 H	Amendment to Circular of the Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform Number 2 of 2025 on Adjustment to the Implementation of Service Duties of State Civil Apparatus Employees at Government Agencies and the Implementation of Public Services during National Holidays and Joint Join Leaves for the Day of Silence 1947 Saka and Eid al-Fitr 1446 H
SE MENTERI KESEHATAN	HK.02.01/MENKES/164/2025	KESIAPSIAGAAN ARUS MUDIK DAN LIBUR HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN 1446 HIJRIAH/2025 MASEHI	Preparedness for Eid al-Fitr 1446 Hijri/2025 AD Holiday and Homecoming Flow
SE MENTERI PERHUBUNGAN	SE-MHB 2/2025	PELAKSANAAN MONITORING PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LEBARAN TAHUN 2025 (1446 H)	Implementation of Monitoring of Transportation Organization for 2025 Eid Al-fitr Holiday (1446 H)
PERATURA DIRJEN BEA DAN CUKAI	PER-5/BC/2025	PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-22/BC/2009 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR	Sixth Amendment to Regulation of the Director General of Customs and Excise Number P-22/BC/2009 on Import Customs Notification

PERATURAN DIRJEN PAJAK	PER-3/PJ/2025	PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-04/PJ/2022 TENTANG BADAN ATAU LEMBAGA YANG DIBENTUK ATAU DISAHKAN OLEH PEMERINTAH YANG DITETAPKAN SEBAGAI PENERIMA ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO	Fourth Amendment to Regulation of the Director-General of Tax Number Per-04/PJ/2022 on Entities or Agencies Established or Authorized by the Government that are Designated as Recipients of Zakat or Mandatory Religious Contributions that can be Deducted from Gross Income
KEPUTUSAN DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT	A.175/AL.308/DJPL	PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA TERMINAL KHUSUS DAN TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI MELALUI SISTEM MARITIMHUB	Technical Guidelines for the Implementation of Business Licensing Activities to Support Special Terminal and Private-Interest Terminal Business Activities through the Maritime Hub System
	KP-DJPL 258/2025	PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING APLIKASI MARITIMHUB DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT	Establishment of Maritime Hub App Companion Team of the Directorate General of Sea Transportation
PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN	5 Tahun 2025	SIAGA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN	Search and Rescue Alert
PERATURAN BPKP	1 Tahun 2025	PEMBINAAN TERHADAP INSPEKTORAT, PUSAT, DAN PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	Guidance for the Inspectorate, Central, and Representatives of the Financial and Development Supervisory Agency
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BI	7 Tahun 2025	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN INSENTIF LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL	Third Amendment to Regulation of Members of the Board of Governors Number 11 of 2023 on Implementing Regulation for Macroprudential Liquidity Incentive Policy
	6 Tahun 2025	PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 22/34/PADG/2020 TENTANG PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN THAILAND MENGGUNAKAN RUPIAH DAN BAHT MELALUI BANK	Amendment to Regulation of Members of the Board of Governors Number 22/34/PADG/2020 on Settlement of Bilateral Transactions Between Indonesia and Thailand Using Rupiah and Baht through Banks
	5 Tahun 2025	PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 23/12/PADG/2021 TENTANG PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA MENGGUNAKAN RUPIAH DAN RINGGIT MELALUI BANK	Amendment to Regulation of Members of the Board of Governors Number 23/12/PADG/2021 on Settlement of Bilateral Transactions Between Indonesia and Malaysia Using Rupiah and Ringgit through Banks
RANCANGAN PERATURAN OJK		PELAPORAN BANK UMUM MELALUI SISTEM PELAPORAN OTORITAS JASA KEUANGAN	Commercial Bank Reporting through the Reporting System of the Financial Services Authority
PERATURAN DIREKSI BEI	II-A	PERDAGANGAN EFEK BERSIFAT EKUITAS	*Equity Securities Trading*
KEPUTUSAN DIREKSI BEI	KEP-00002/BEI/04-2025	PERUBAHAN PANDUAN PENANGANAN KELANGSUNGAN PERDAGANGAN DI BURSA EFEK INDONESIA DALAM KONDISI DARURAT	*the Amendment to the Guidelines for Handling Trading Continuity at the Indonesia Stock Exchange During Emergency Situations*
KEPUTUSAN KEPALA BSN	59A/KEP/BSN/3/2025	STANDAR PELAYANAN TERPADU BADAN STANDARDISASI NASIONAL	Integrated Service Standards of the National Standardization Agency
SE DIREKSI BEI	SE-00001/BEI/03-2025	TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN DAN/ATAU PERMOHONAN YANG DIATUR DALAM PERATURAN PERDAGANGAN OLEH ANGGOTA BURSA EFEK KEPADA BURSA	Procedures for the Submission of Reports and/or Applications Regulated in Trading Regulations by Members of the Stock Exchange to the Exchange
SE KEPALA BSN	1/SE/KA.BSN/3/2025	IMPLEMENTASI PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR NASIONAL INDONESIA	Implementation of Regulation of the National Standardization Agency Number 9 of 2023 on Procedures for Preparation of Conformity Assessment Schemes to Indonesian National Standards
RANCANGAN SE OJK		PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN LAYANAN PENGADUAN	Preparation and Submission of Complaint Service Reports
		PENYEDIAAN INFORMASI DAN PENYAMPAIAN INFORMASI UNTUK PEMASARAN PRODUK DAN LAYANAN JASA KEUANGAN	Provision of Information and Submission of Information for Marketing of Financial Products and Services
SE GUBERNUR BALI	9 Tahun 2025	GERAKAN BALI BERSIH SAMPAH	Bali Clean Waste Movement